

- A.A. Islahi, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Bina Ilmu, Surabaya
- Ancok, Djamalludin, 1992. *Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan*, Aditya Media, Jakarta.
- Bintoro Tjokromijoyo, 1985, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bryant, Coralie dan White, Louise G, 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, (terjemahan) LP3ES, Jakarta.
- Candra Fajri Ananda, 2000, *Peran Partisipasi Masyarakat Pada Otonomi Daerah*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Loekman Soetrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moelyarto Tjokro Winoto, 1994, Buletin BPA UGM, *Beberapa teknik dalam hubungan kerja*, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rusda Karya, Bandung.
- Mubyarto, 1993, *Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto dan Sartono Kartodirjo, 1981, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Nugroho, Heru, 1999, *Lembaga Lokal Sebagai Lembaga Mediasi*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Somodiningrat, Gunawan, 1995, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, IKIP, Depdikbud, Malang.



Peran Musyawarah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul
SUTIKNO, Drs. Djoko Suseno, SU

Somodiningrat, Gunawan, 1996, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Pena Pariwisata, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 1983, *Administrasi Pembangunan*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Tjokiro Winoto, Moelyarto, 1993, *Strategy Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*, P3PK UGM, Yogyakarta.

Tjokiro Winoto, Moelyarto, 1999, *Dilema dan Tantangan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

BAHAN BACAAN

- Warsito Utomo, 2001, *Implikasi implementasi otonomi daerah terhadap program pengembangan kecamatan*, Dosen Fisipol dan Pasca Sarjana UMG.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi daerah RI, 2001, *Kebijakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional PPK*, Depdagri.
- Tim Koordinasi PPK Pusat, 2003, *Sistem Akuntansi UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK)*, Depdagri.
- Tim Koordinasi PPK Pusat, 1999, *Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 1999/2000*, Depdagri.
- Tim Koordinasi PPK Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003, *Panduan Sosialisasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II*, Bappeda Propinsi DIY.
- Tim Koordinasi PPK Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003, *Pembinaan dan Pengendalian Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II*, Bappeda Propinsi DIY.
- Tim Koordinasi PPK Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003, *Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Bappeda Propinsi DIY.
- Dirjen PMD, 1999, *Pembangunan mitra sejati dan associate*, bahan bacaan pelatihan konsultasi pendamping Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- Instruksi Presiden RI, 1993 *Peningkatan penanggulangan kemiskinan*, Dirjen PMD.
- Menteri Dalam Negeri, 1995, *Petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan pembangunan desa tertinggal (IDT)*, Dirjen PMD.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.